

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Agen Pembaharu

Agen pembaharu (*agent of change*) adalah individu atau institusi yang memfasilitasi adopsi inovasi oleh masyarakat (Rogers, 2003). DPMD berfungsi sebagai agen pembaharu karena memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merancang program pemberdayaan, dan mempromosikan perubahan melalui pendekatan partisipatif (Mardikanto & Soebiato, 2017). Teori Difusi Inovasi yang dikembangkan oleh (Rogers, 2003) proses difusi inovasi meliputi lima tahap:

1) Pengetahuan (*knowledge*)

Pada tahap pengetahuan (*knowledge*), individu atau kelompok pertama kali mengenal adanya inovasi dan memahami bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Menurut (Rogers, 2003) tahap ini merupakan fondasi awal dalam proses adopsi inovasi, di mana seseorang menyadari keberadaan inovasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, interaksi sosial, atau penyuluhan. Pada fase ini, informasi yang diterima harus jelas dan mudah dipahami agar dapat memicu minat untuk mempelajari lebih lanjut. Sumber informasi memegang peranan krusial dalam tahap pengetahuan, sebagaimana dijelaskan oleh (Suryanto, 2018) bahwa efektivitas penyampaian informasi tentang inovasi sangat bergantung pada kredibilitas sumber, seperti ahli, lembaga terpercaya, atau media yang dapat diandalkan. Jika informasi yang diberikan tidak akurat atau sulit diakses, maka proses difusi bisa terhambat sejak tahap awal. Oleh karena itu, penggunaan saluran komunikasi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik sasaran menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, tingkat kesiapan mental (*readiness*) penerima inovasi juga berpengaruh pada tahap pengetahuan. Menurut penelitian (Maulana dan Hubeis, 2017) yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap suatu inovasi cenderung lebih aktif mencari informasi. Faktor seperti pendidikan, pengalaman, dan latar belakang

sosial budaya turut menentukan sejauh mana seseorang mampu memahami inovasi yang diperkenalkan. Dengan demikian, tahap pengetahuan tidak hanya sekadar mengetahui, tetapi juga melibatkan proses pemahaman awal yang mendorong individu untuk beralih ke tahap berikutnya dalam proses adopsi inovasi.

2) Persuasi (*persuasion*)

Pada tahap persuasi (*persuasion*), individu atau kelompok mulai membentuk sikap positif atau negatif terhadap inovasi setelah memperoleh informasi awal. Menurut penelitian (Wibowo dan Santoso, 2019) tahap ini ditandai dengan proses evaluasi inovasi berdasarkan manfaat, kesesuaian dengan kebutuhan, serta risiko yang mungkin timbul. Pada fase ini, faktor-faktor seperti keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, kemampuan uji coba, dan observabilitas menjadi pertimbangan utama dalam membentuk persepsi. Komunikasi interpersonal, seperti diskusi dengan orang yang sudah mengadopsi inovasi, sering kali lebih efektif daripada media massa dalam memengaruhi keputusan. Peran agen perubahan (*agent of change*) sangat krusial dalam tahap persuasi, sebagaimana dijelaskan oleh (Nurhayati dan Asngari, 2020) agen perubahan bertugas memberikan bukti konkret, testimoni, atau demonstrasi untuk meyakinkan calon pengadopsi bahwa inovasi tersebut bermanfaat dan layak dicoba. Misalnya, dalam konteks pertanian, petani akan lebih mudah terpersuasi jika melihat langsung hasil penerapan teknologi baru di lapangan. Selain itu, dukungan sosial dari kelompok referensi, seperti tokoh masyarakat atau pemimpin opini, juga mempercepat proses persuasi karena adanya kepercayaan terhadap figur otoritas.

Faktor psikologis seperti motivasi dan persepsi risiko juga memengaruhi tahap persuasi. Penelitian oleh (Prasetyo dan Wahyuni, 2021) menunjukkan bahwa individu dengan tingkat kecemasan tinggi cenderung lebih resisten terhadap inovasi, terutama jika dianggap berisiko. Sebaliknya, mereka yang memiliki rasa ingin tahu besar dan sikap terbuka lebih mudah terujuk untuk mencoba hal baru. Oleh karena itu, strategi komunikasi pada tahap ini harus

bersifat partisipatif, melibatkan dialog dua arah, dan menyajikan informasi yang mampu mengurangi keraguan sekaligus meningkatkan keyakinan akan manfaat inovasi.

3) keputusan (decision)

Tahap keputusan (decision) merupakan fase kritis dalam proses difusi inovasi di mana individu atau kelompok menentukan apakah akan menerima atau menolak inovasi tersebut. Menurut penelitian oleh (Rahayu dan Setiawan, 2020) tahap ini melibatkan proses evaluasi mendalam terhadap keuntungan dan kerugian inovasi berdasarkan informasi yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Faktor-faktor seperti manfaat ekonomis, kemudahan penggunaan, dan dukungan teknis menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Pada tahap ini, individu mungkin melakukan uji coba terbatas (*trialability*) untuk memastikan kelayakan inovasi sebelum mengadopsinya sepenuhnya.

Peran lingkungan sosial dan norma kelompok sangat berpengaruh dalam tahap keputusan, sebagaimana diungkapkan oleh (Susanto, 2019) tekanan sosial dari kelompok referensi, seperti keluarga, teman, atau tokoh masyarakat, sering kali menjadi penentu utama dalam penerimaan atau penolakan suatu inovasi. Misalnya, petani cenderung mengadopsi teknologi baru jika melihat anggota kelompoknya telah berhasil menerapkannya. Selain itu, ketersediaan sumber daya seperti modal, akses informasi, dan dukungan institusi juga memengaruhi keputusan akhir. Tanpa dukungan ini, meskipun inovasi dianggap menguntungkan, adopsi mungkin tertunda atau bahkan ditolak. Selain faktor eksternal, karakteristik individu juga berperan penting dalam tahap keputusan. Penelitian oleh (Handayani dan Nugroho, 2021) menunjukkan bahwa kepribadian inovatif, tingkat pendidikan, dan pengalaman masa lalu dengan inovasi serupa memengaruhi keberanian seseorang mengambil keputusan. Individu yang lebih terbuka terhadap perubahan dan memiliki literasi teknologi cenderung lebih cepat memutuskan untuk mengadopsi inovasi. Sebaliknya, mereka yang skeptis atau pernah

memiliki pengalaman buruk dengan inovasi sebelumnya akan lebih berhati-hati. Dengan demikian, tahap keputusan tidak hanya bersifat rasional tetapi juga dipengaruhi oleh aspek psikologis dan sosial budaya.

4) Implementasi (*implementation*)

Pada tahap implementasi (*implementation*), inovasi mulai diterapkan secara nyata oleh pengadopsi setelah melalui proses pengambilan keputusan. Menurut penelitian (Siregar dan Nasution, 2022) tahap ini merupakan fase kritis dimana terjadi adaptasi antara inovasi dengan konteks lokal pengadopsi. Implementasi seringkali membutuhkan modifikasi inovasi agar sesuai dengan kondisi spesifik pengguna, terutama dalam konteks pertanian atau teknologi tepat guna. Pada fase ini, dukungan teknis dari penyuluh atau agen perubahan sangat dibutuhkan untuk memastikan penerapan yang tepat. Proses implementasi tidak selalu berjalan mulus dan sering menghadapi berbagai kendala. (Wijayanto et al. 2021) menemukan bahwa masalah utama dalam implementasi inovasi pertanian meliputi keterbatasan sarana prasarana, kesenjangan pengetahuan teknis, dan resistensi dari masyarakat. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pendampingan intensif selama fase awal implementasi untuk mengatasi berbagai hambatan praktis. Selain itu, dukungan kelembagaan seperti akses pembiayaan dan kebijakan pemerintah yang mendukung juga turut menentukan keberhasilan implementasi.

Durasi tahap implementasi bervariasi tergantung kompleksitas inovasi dan karakteristik pengadopsi. Menurut analisis (Purwanto dan Sari, 2023) inovasi sederhana dengan manfaat langsung yang terlihat (*observability*) cenderung lebih cepat diimplementasikan secara penuh. Sebaliknya, inovasi kompleks membutuhkan waktu adaptasi lebih lama dan seringkali melalui tahap uji coba berulang. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengadopsi yang telah melalui tahap implementasi dengan sukses cenderung menjadi promotor alami yang mendorong adopsi lebih luas di masyarakat.

5) Konfirmasi (*confirmation*)

Tahap konfirmasi (*confirmation*) merupakan fase akhir dalam proses difusi inovasi dimana pengadopsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil implementasi inovasi. Menurut penelitian oleh (Hartono dan Prasetyo, 2022) pada tahap ini pengadopsi akan membandingkan manfaat yang diperoleh dengan ekspektasi awal serta mempertimbangkan untuk melanjutkan, memodifikasi, atau bahkan menghentikan penggunaan inovasi. Fase ini sangat krusial karena menentukan apakah inovasi akan diadopsi secara permanen atau justru ditinggalkan. Pengadopsi biasanya akan mencari validasi tambahan melalui umpan balik dari pengguna lain atau evaluasi mandiri terhadap hasil yang dicapai. Dinamika sosial memainkan peran penting dalam tahap konfirmasi, sebagaimana diungkapkan dalam studi (Kurniawati, 2021) menemukan bahwa keputusan akhir untuk mengkonfirmasi adopsi inovasi sangat dipengaruhi oleh tanggapan lingkungan sosial sekitar. Jika kelompok sosial memberikan dukungan dan mengakui manfaat inovasi, maka pengadopsi cenderung akan melanjutkan penggunaan. Sebaliknya, tekanan sosial negatif dapat menyebabkan pengadopsi menghentikan inovasi meskipun sebenarnya memberikan manfaat. Fenomena ini sering terlihat dalam adopsi inovasi pertanian dimana petani sangat memperhatikan pendapat sesama anggota kelompok tani.

Faktor pengalaman pribadi selama implementasi menjadi penentu utama dalam tahap konfirmasi. Penelitian terbaru oleh (Saputra dan Wijaya, 2023) bahwa kepuasan subjektif pengadopsi lebih berpengaruh daripada parameter objektif dalam pengambilan keputusan akhir. Studi kasus pada adopsi teknologi irigasi menunjukkan bahwa petani yang merasa terbantu meskipun dengan peningkatan hasil yang tidak signifikan cenderung melanjutkan penggunaan, sementara yang mengalami kesulitan teknis akan meninggalkan inovasi meskipun secara teoritis menguntungkan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendampingan pasca-implementasi untuk memastikan konfirmasi positif terhadap inovasi.

2.1.2 DPMD sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memainkan peran strategis sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Menurut penelitian (Suryana dan Hidayat, 2021) DPMD berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat desa dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pemberdayaan. Sebagai fasilitator, DPMD tidak hanya bertugas menyampaikan kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga membantu masyarakat mengidentifikasi potensi lokal dan kebutuhan spesifik desa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Konsep fasilitasi yang diemban DPMD mencakup berbagai aspek pemberdayaan, mulai dari penguatan kelembagaan desa hingga pengembangan kapasitas masyarakat. Dalam kajian yang dilakukan oleh (Wibowo, 2020) disebutkan bahwa DPMD berperan penting dalam memfasilitasi pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dan kelompok masyarakat. Fasilitasi ini meliputi transfer pengetahuan, pengembangan keterampilan, serta pendampingan teknis dalam pengelolaan dana desa dan program pembangunan lainnya. Dengan demikian, DPMD berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat proses pembelajaran dan adaptasi masyarakat terhadap berbagai inovasi pembangunan.

Salah satu peran kunci DPMD sebagai fasilitator adalah dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk program pemberdayaan. Penelitian oleh (Nurhayati, 2022) mengungkapkan bahwa DPMD bertugas memastikan alokasi dana desa sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip pemberdayaan. Fasilitasi ini dilakukan melalui pendampingan, sosialisasi regulasi, serta pengawasan implementasi program. Pendekatan partisipatif yang diterapkan DPMD memungkinkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam perencanaan pembangunan desa. Dalam konteks penguatan ekonomi masyarakat, DPMD berperan sebagai fasilitator pengembangan usaha mikro dan koperasi desa. (Prasetyo, 2021) dalam menyebutkan bahwa DPMD memfasilitasi akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta pemasaran produk unggulan desa. Fasilitasi ini dilakukan

melalui sinergi dengan berbagai stakeholder, termasuk perbankan, dinas terkait, dan pelaku usaha. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan terciptanya ekosistem usaha yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat desa.

DPMD juga berfungsi sebagai fasilitator dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan transparan. Menurut analisis (Santoso dan Rahmawati, 2023) DPMD memfasilitasi penguatan kapasitas BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan fungsi pengawasan dan partisipasi masyarakat. Fasilitasi ini mencakup pelatihan penyusunan peraturan desa, pengelolaan informasi pembangunan desa, serta mekanisme pengaduan masyarakat. Dengan pendekatan ini, DPMD berkontribusi dalam menciptakan tata kelola desa yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi DPMD sebagai fasilitator pemberdayaan adalah disparitas kapasitas antar daerah dan keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian oleh (Handayani, 2022) mengidentifikasi bahwa efektivitas fasilitasi DPMD sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM aparatur, ketersediaan anggaran, serta dukungan politik lokal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan DPMD melalui peningkatan kompetensi fasilitator, pengembangan sistem pendampingan berkelanjutan, serta penguatan koordinasi antar sektor. Dengan demikian, DPMD dapat optimal menjalankan perannya sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan.

2.1.3 Tugas/peran fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitator pemberdayaan masyarakat memegang peran sentral sebagai katalisator perubahan sosial dalam proses pembangunan partisipatif. Menurut (Suryana, 2019). Fasilitator berfungsi sebagai penghubung antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Peran ini mencakup penyelarasan berbagai kepentingan dan potensi konflik melalui pendekatan dialogis yang mengedepankan prinsip kesetaraan. Fasilitator yang efektif harus mampu menciptakan ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa tekanan atau dominasi dari kelompok tertentu.

Dalam konteks pengembangan kapasitas masyarakat, fasilitator bertindak sebagai pendamping proses pembelajaran kolektif. (Wibowo, 2020) menjelaskan bahwa tugas utama fasilitator adalah membangkitkan kesadaran kritis masyarakat akan potensi dan masalah yang mereka hadapi. Fasilitator tidak memberikan solusi instan, melainkan memandu masyarakat melalui proses analisis situasi, identifikasi kebutuhan, dan perumusan solusi secara mandiri. Pendekatan ini menekankan pada prinsip bahwa masyarakat adalah subjek utama perubahan, bukan sekadar penerima manfaat pasif.

Peran fasilitator dalam penguatan kelembagaan lokal menjadi aspek penting dalam pemberdayaan berkelanjutan. (Nurhayati, 2018) mengungkapkan bahwa fasilitator bertugas membantu pengorganisasian masyarakat melalui penguatan kelompok-kelompok berbasis komunitas. Fasilitator mendorong terbentuknya struktur organisasi yang demokratis, sistem pengambilan keputusan partisipatif, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Proses ini mencakup pendampingan dalam penyusunan aturan main kelompok, pembagian peran, dan pengembangan sistem pengelolaan sumber daya secara kolektif. Fasilitator pemberdayaan juga berperan sebagai mediator dalam mengakses berbagai sumber daya eksternal. Menurut (Prasetyo, 2018). Fasilitator membantu masyarakat menjembatani hubungan dengan institusi pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendukung lainnya. Peran ini mencakup pendampingan dalam penyusunan proposal, negosiasi kemitraan, serta pengawalan implementasi program. Fasilitator yang kompeten harus memahami berbagai skema bantuan dan regulasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, sekaligus menjaga prinsip kemandirian lokal dalam proses pemanfaatan sumber daya eksternal tersebut. Dalam dimensi pengembangan ekonomi lokal, fasilitator berperan sebagai pendorong inovasi dan kewirausahaan sosial. Penelitian (Lautaro Jufriyanto, 2022) menunjukkan bahwa fasilitator pemberdayaan membantu masyarakat mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, mengembangkan model bisnis yang adaptif, serta membangun jaringan pemasaran. Pendekatan ini tidak hanya

terfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kearifan lokal dan keberlanjutan ekologis. Fasilitator yang efektif akan mendorong terciptanya sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi fasilitator pemberdayaan adalah menjaga keseimbangan antara pendampingan teknis dan penguatan nilai-nilai kemandirian masyarakat. (Handayani, 2021) mengungkapkan bahwa fasilitator sering dihadapkan pada dilema antara memenuhi target program jangka pendek dengan membangun kapasitas masyarakat jangka panjang. Fasilitator yang ideal harus memiliki kompetensi teknis sekaligus sensitivitas sosial budaya, mampu beradaptasi dengan dinamika lokal, serta konsisten pada prinsip-prinsip pemberdayaan yang partisipatif dan transformatif.

2.1.3.1 Pengertian Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), upaya didefinisikan sebagai usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb). Dalam konteks akademis dan profesional di Indonesia, konsep upaya sering dikaitkan dengan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

(Suharto, 2010) dalam “Membangun Masyarakat yang Memberdayakan Rakyat,” mengartikan upaya pemberdayaan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan dan pemberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Ia menekankan, upaya pemberdayaan harus mencakup aspek-aspek seperti penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan.

2.1.3.2 Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut (Isnaini et al., 2020) dalam penelitiannya tentang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. DPMD berperan penting dalam memfasilitasi proses ini melalui berbagai program dan kebijakan.

(Saputra et al., 2022) menjelaskan bahwa DPMD memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat desa melalui tiga aspek utama: pengembangan

kapasitas, fasilitasi akses sumber daya, dan pengembangan kemitraan. Mereka menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam upaya pemberdayaan.

(Pratiwi et al., 2022) mengkaji peran teknologi dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Mereka menemukan bahwa DPMD dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, pasar, dan layanan pemerintah. Pengembangan desa digital menjadi salah satu strategi yang disarankan.

2.1.3.3 Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Fasilitator Pembangunan DPMD berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan di tingkat desa. DPMD memfasilitasi proses partisipasi masyarakat sehingga pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal (Abidin et al., 2022).
- 2) Pengembangan Kapasitas DPMD berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan transfer pengetahuan. Hal ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan potensi lokal (Nasdian, 2014).
- 3) Penguatan Kelembagaan DPMD berperan dalam penguatan kelembagaan lokal seperti BPD, BUMDES, dan kelompok masyarakat lainnya. Penguatan ini penting untuk menciptakan tata kelola desa yang baik dan mendorong kemandirian (Putra Dwi AD et al., 2018).
- 4) Pemberdayaan Ekonomi DPMD mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM, koperasi, dan BUMDes. Fokusnya adalah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Suharto, 2010).
- 5) Advokasi dan Pendampingan DPMD berperan sebagai advokat dan pendamping masyarakat dalam mengakses program pemerintah dan sumber daya pembangunan. DPMD membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam pembangunan desa (Ife & Tesoriero, 2016).

- 6) Pengembangan Inovasi DPMD mendorong inovasi dalam pembangunan desa dengan memperkenalkan teknologi tepat guna dan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan (Chambers, 2015).

2.1.3.4 Konsep Pemanfaatan Penggunaan

Konsep pemanfaatan merujuk pada proses optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Menurut penelitian (Suryana, 2023) oleh pemanfaatan tidak sekadar berarti penggunaan, melainkan juga mencakup pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan agar sumber daya dapat memberikan manfaat maksimal. Dalam konteks pembangunan, pemanfaatan yang baik harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan keberlanjutan di masa depan. Hal ini menuntut pendekatan yang holistik dan terencana agar sumber daya tidak hanya dieksploitasi, tetapi juga dikelola secara bertanggung jawab. Dalam bidang ekonomi, pemanfaatan sering dikaitkan dengan optimalisasi aset produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Wibowo, 2022) menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja harus dilakukan dengan prinsip keadilan distributif. Artinya, manfaat yang diperoleh harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok. Pendekatan ini menekankan pentingnya regulasi dan kebijakan yang mendorong pemanfaatan inklusif, sehingga pembangunan ekonomi tidak menciptakan kesenjangan yang semakin lebar.

Di tingkat komunitas, pemanfaatan sumber daya lokal menjadi kunci dalam membangun kemandirian masyarakat. (Nurhayati, 2023) menyatakan bahwa pemanfaatan potensi lokal, seperti budaya, kearifan tradisional, dan sumber daya alam, dapat memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi. Misalnya, pengembangan produk unggulan berbasis bahan baku lokal tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga melestarikan identitas budaya. Fasilitasi dari pemerintah dan lembaga swadaya menjadi penting dalam mendorong masyarakat untuk mengenali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dalam konteks teknologi, pemanfaatan inovasi menjadi faktor pendorong efisiensi dan produktivitas. (Prasetyo, 2021) mengungkapkan bahwa

adopsi teknologi tepat guna dapat mempercepat proses produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas hasil. Namun, pemanfaatan teknologi harus disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan pengguna agar tidak menimbulkan ketergantungan atau disrupsi sosial. Pendampingan dan edukasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa teknologi benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip keberlanjutan ekologis. Menurut (Santoso, 2022) eksploitasi berlebihan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan akan mengancam kelestarian ekosistem. Oleh karena itu, konsep pemanfaatan berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Praktik seperti pertanian organik, ekowisata, dan energi terbarukan menjadi contoh bagaimana sumber daya dapat dimanfaatkan tanpa merusak alam.

Dalam bidang pendidikan, pemanfaatan sumber belajar menjadi penentu keberhasilan proses pembelajaran. (Handayani, 2022) menjelaskan bahwa pemanfaatan media pembelajaran, perpustakaan, dan teknologi digital dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidik dituntut untuk kreatif dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar agar materi dapat disampaikan secara efektif dan menarik. Selain itu, pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar juga dapat memperkaya pengalaman siswa dan mendorong pembelajaran kontekstual. Pemanfaatan ruang publik juga menjadi isu penting dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan. (Kurniawan, 2022) menunjukkan bahwa ruang publik yang dimanfaatkan secara optimal dapat meningkatkan interaksi sosial, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup. Misalnya, taman kota yang dirancang dengan baik tidak hanya menjadi tempat rekreasi tetapi juga ruang edukasi dan pengembangan kreativitas. Perencanaan partisipatif dalam pemanfaatan ruang publik diperlukan agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam konteks kesehatan, pemanfaatan pelayanan kesehatan menjadi indikator penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (Rahayu, 2021) mengungkapkan bahwa akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang

merata dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Namun, faktor sosial budaya seringkali menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan kesehatan, seperti kepercayaan terhadap pengobatan tradisional atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pemeriksaan rutin. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang efektif diperlukan untuk mendorong pemanfaatan layanan kesehatan secara optimal. Pemanfaatan waktu juga menjadi aspek krusial dalam meningkatkan produktivitas individu dan organisasi. Menurut (Wijaya, 2023) manajemen waktu yang baik memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan tugas secara efisien tanpa mengorbankan kualitas hidup. Konsep pemanfaatan waktu tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan tetapi juga keseimbangan antara karir, keluarga, dan waktu pribadi. Pelatihan manajemen waktu dan penyusunan prioritas menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan waktu.

2.1.3.5 Penggunaan *Electronic Human Development Worker*

1) Konsep *E-hdw*

Electronic Human Development Worker (e-HDW) adalah sistem informasi berbasis aplikasi yang dirancang untuk membantu pekerja sosial dan petugas pembangunan manusia dalam mengelola data, melakukan pemantauan, dan memberikan layanan kepada masyarakat. Menurut (Herdiansah et al., 2023), *e-HDW* merupakan bagian dari implementasi e-government yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pembangunan manusia.

Penggunaan aplikasi *Electronic Human Development Worker (e-HDW)* merupakan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut (Prasetyo & Sutopo, 2018), *e-HDW* berfungsi sebagai platform digital yang memfasilitasi interaksi antara pekerja pembangunan manusia dengan masyarakat sasaran. Aplikasi ini memungkinkan penyampaian informasi, konsultasi, dan pendampingan secara *real-time*, sehingga meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan pemberdayaan masyarakat.

Implementasi *e-HDW* sejalan dengan konsep *smart village* yang dikemukakan oleh Sutriadi (2018), dimana teknologi digital diintegrasikan

ke dalam berbagai aspek kehidupan desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Aplikasi ini membantu mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan akses ke pengetahuan dan keahlian yang lebih luas. Hal ini memungkinkan transfer pengetahuan yang lebih efektif dan membantu mempercepat proses pembangunan kapasitas masyarakat desa.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, (Widiastuti et al., 2019) mengemukakan bahwa *e-HDW* dapat berfungsi sebagai platform untuk menghubungkan UMKM desa dengan pasar yang lebih luas. Aplikasi ini memfasilitasi pemasaran digital, akses ke informasi pasar, dan bahkan layanan keuangan digital. Dengan demikian, *e-HDW* tidak hanya berfokus pada aspek sosial pemberdayaan, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat desa.

Meskipun memiliki potensi besar, (Fuadi et al., 2024) mengingatkan bahwa implementasi *e-HDW* juga menghadapi tantangan, terutama terkait infrastruktur digital dan literasi teknologi di daerah pedesaan. Oleh karena itu, penggunaan *e-HDW* perlu diimbangi dengan program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Selain itu, pengembangan konten lokal yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat desa menjadi kunci keberhasilan implementasi *e-HDW* dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

2) Tujuan dan Manfaat *E-hdw*

Beberapa tujuan dan manfaat penggunaan aplikasi *e-HDW* menurut (Khobibah et al., 2022) antara lain:

- a. Meningkatkan efisiensi kerja petugas pembangunan manusia
- b. Mempercepat proses pengumpulan dan analisis data
- c. Meningkatkan akurasi data pembangunan manusia
- d. Memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program pembangunan manusia.

3) Fitur – fitur *E-hdw*

Berdasarkan penelitian (Bubung Bunyamin & Fajar Alan Syahrier, 2024) aplikasi *e-HDW* umumnya memiliki fitur-fitur sebagai berikut:

- a. Manajemen data keluarga dan individu
- b. Pemantauan status kesehatan dan gizi
- c. Pencatatan dan pemantauan program bantuan sosial
- d. Sistem pelaporan dan visualisasi data
- e. Komunikasi dan koordinasi antar petugas

4) Implementasi *E-hdw* di Indonesia

Implementasi *e-HDW* di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan uji coba di beberapa daerah. Menurut (Sasmito, 2019), beberapa tantangan dalam implementasi *e-HDW* di Indonesia meliputi:

- a. Infrastruktur teknologi yang belum merata
- b. Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam penggunaan teknologi
- c. Resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem digital
- d. Keamanan data dan privasi
- e. Dampak Penggunaan *E-hdw*

(Khobibah et al., 2022) menemukan bahwa penggunaan *e-HDW* memiliki dampak positif terhadap:

- 1) Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat
- 2) Efisiensi waktu dan biaya dalam pelaksanaan program pembangunan manusia
- 3) Peningkatan akurasi data untuk pengambilan keputusan
- 4) Peningkatan koordinasi antar lembaga terkait.

2.1.3.6 Teori yang berkaitan dengan aplikasi *e-HDW*

1) Teori Adopsi Teknologi

Teori adopsi teknologi merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana individu atau organisasi menerima dan menggunakan teknologi baru. Salah satu model yang sering digunakan adalah *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh

Davis pada tahun 1989. Menurut Setyo (2017) TAM berfokus pada dua konstruk utama yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Persepsi kegunaan mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi tertentu akan meningkatkan kinerjanya, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan merujuk pada sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi tersebut akan bebas dari usaha.

2) *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)*

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. pada tahun 2003. Sebagaimana dijelaskan oleh (Handayani & Sudiana, 2015), UTAUT mengintegrasikan delapan model adopsi teknologi yang ada sebelumnya dan mengusulkan empat konstruk utama yang mempengaruhi niat perilaku untuk menggunakan teknologi, yaitu: ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi. Model ini juga mempertimbangkan faktor-faktor moderasi seperti jenis kelamin, usia, pengalaman, dan kesukarelaan penggunaan. UTAUT telah terbukti mampu menjelaskan hingga 70% varian dalam niat penggunaan teknologi, menjadikannya model yang kuat untuk memahami proses adopsi teknologi.

3) Teori Kesesuaian Tugas

Teori Kesesuaian Tugas-Teknologi (TTF) digunakan oleh Ramadhan dan Kusuma (2017) untuk mengevaluasi efektivitas e-HDW. Teori ini berfokus pada sejauh mana teknologi membantu individu dalam pelaksanaan tugasnya. Mereka mengidentifikasi beberapa dimensi TTF dalam konteks e-HDW:

- a. Kualitas Data
- b. Lokabilitas Data
- c. Otorisasi Akses Data
- d. Kompatibilitas Data

- e. Kemudahan Penggunaan
- f. Ketepatan Waktu Produksi
- g. Keandalan Sistem
- h. Hubungan dengan Pengguna

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian *e-HDW* dengan tugas petugas pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap kinerja individu.

4) Model Kesuksesan Sistem Informasi

Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean digunakan oleh (Sensuse et al., 2022) untuk mengevaluasi kesuksesan implementasi *e-HDW*. Model ini mencakup enam dimensi:

- a. Kualitas Sistem
- b. Kualitas Informasi
- c. Kualitas Layanan
- d. Penggunaan
- e. Kepuasan Pengguna
- f. Manfaat Bersih

Penelitian mereka menunjukkan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna dan manfaat bersih dari penggunaan *e-HDW*.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

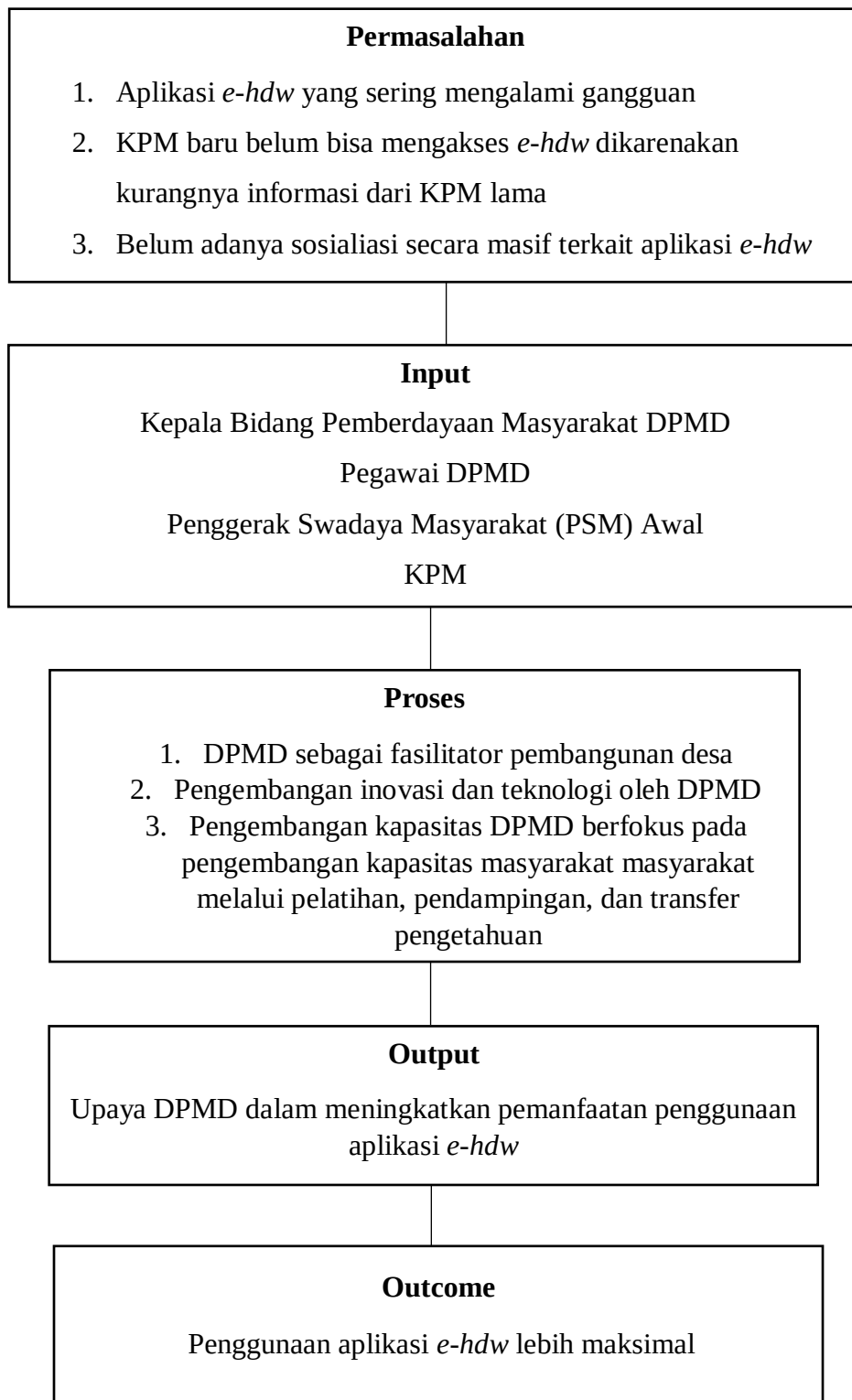
- 1) Penelitian yang dilakukan oleh (Sarita et al., 2022) dengan judul “Implementasi penggunaan *Electronic Human Development Worker* dalam menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Ogan Kuningan Ulu”. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan aplikasi *Electronic Human Development Worker* yang masih belum dimaksimalkan penggunaannya. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa para Kader Pembangunan Manusia (KPM) masih banyak yang belum paham terkait tujuan penggunaan aplikasi *e-hdw* dalam menurunkan angka *stunting*.

- 2) Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Khobibah et al., 2022) yang berjudul “Pelatihan Aplikasi *E-HDW* Bagi Kader Dalam Program Konvergensi Percepatan dan Penurunan Angka *Stunting*”. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum maksimalnya penggunaan aplikasi *Electronic Human Development Worker* oleh KPM. Alasan utama dari para KPM ini adalah para KPM belum paham tentang beberapa fitur yang ada di aplikasi *e-hdw* tersebut. Pelatihan ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia), dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal. Hasil dari penelitian ini adalah para KPM menjadi lebih paham tentang fungsi dan bagaimana cara menggunakan aplikasi *e-hdw*.
- 3) Penelitian dengan judul “Pelatihan Konvergensi *Stunting* Untuk Kader Posyandu Balita Di Desa Karya Mulia Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih” yang dilakukan oleh (Endrekson et al., 2021) ini bertujuan untuk memberikan pelatihan konvergensi *stunting* dengan menggunakan aplikasi *e-hdw*. Pelatihan ini diikuti oleh 15 KPM (Kader Pembangunan Manusia) desa Karya Mulia. Pada pelatihan ini, KPM diberitahu tentang bagaimana cara kerja aplikasi *e-hdw* dan juga diberikan langkah – langkah dalam menginput data di aplikasi *e-hdw*. Penelitian yang dilakukan Apdaliah (2023) dengan judul “implementasi pemanfaatan aplikasi *ehdw* dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan *stunting* terhadap kader pembangunan manusia (kpm) di desa galung kecamatan barru kabupaten barru” ini meneliti tentang bagaimana pemanfaatan aplikasi *electronic human development worker* dalam menghitung konvergensi angka *stunting*. Pada penelitian ini ditemukan masalah yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi *e-hdw* yang ditemukan oleh peneliti yaitu terdapat beberapa faktor, salah satunya adalah sulitnya koneksi internet dalam mengakses aplikasi *e-hdw*.
- 4) Penelitian dengan judul “Efektivitas Komunikasi Aplikasi *E-hdw* dalam Meningkatkan Prevalensi Balita *Stunting* di Kabupaten Bengkalis” yang dilakukan oleh (Nurjanah et al., 2024) ini membahas tentang bagaimana

para Kader Pembangunan Manusia (KPM) menggunakan aplikasi *e-hdw*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dengan adanya aplikasi *e-hdw* ini dapat membantu para KPM dalam melaksanakan konvergensi penurunan *stunting*. Penelitian ini juga membahas tentang kelebihan *e-hdw* yang sangat mempermudah tugas para KPM, salah satunya adalah dalam hal penginputan data. Dengan adanya aplikasi ini, para KPM tidak perlu melakukan pencatatan secara manual.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan yang lainnya dari permasalahan yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan serta menjelaskan suatu topik yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, kerangka konsep disusun berdasarkan permasalahan di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, yang memiliki masalah terkait penggunaan aplikasi *electronic human development worker*. Pembahasan dalam penelitian ini antara lain yaitu:



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

(Sumber, Peneliti 2024)

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka pertanyaan pada penelitian ini yaitu: Bagaimana Upaya DPMD dalam meningkatkan pemanfaatan penggunaan aplikasi *electronic human development worker* ?